

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan iklim merupakan tantangan global yang mendesak untuk ditangani. Laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) tahun 2023 menegaskan bahwa untuk mencegah kenaikan suhu global melebihi batas kritis 1,5 °C, setiap negara harus mulai melakukan kerja sama untuk mencapai netralisasi karbon sebelum tahun 2050. Kegagalan dalam mencapai target ini akan memperburuk bencana alam, mengganggu ekosistem, memperbesar krisis air dan pangan, serta merugikan pertumbuhan ekonomi di seluruh negara yang terdampak.¹

Urgensi global untuk beralih ke sistem energi yang berkelanjutan saat ini telah mencapai tahap yang sangat penting. Pengaruh perubahan iklim yang semakin besar mendorong banyak negara untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan mempercepat peralihan dari energi fosil ke sumber energi terbarukan. Menurut International Energy Agency (IEA), sumber energi terbarukan memiliki sifat yang berkelanjutan karena dapat diperoleh secara terus-menerus dan memiliki dampak yang lebih kecil terhadap lingkungan jika dibandingkan dengan energi fosil.² Transisi energi mengacu kepada sebuah perubahan penggunaan sumber energi fosil kepada sumber Energi Baru Terbarukan (EBT). Transisi energi ini tidak hanya

¹ Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). *Summary for Policymakers. In: Climate Change 2023: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II, and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. Edited by Core Writing Team, H. Lee, and J. Romero. Geneva, Switzerland: IPCC, 2023. <https://doi.org/10.59327/IPCC/AR6-9789291691647.001>.

² Rahmanitya, Nazla, dan Putra Ardiansyah. "Indonesia's *Just Energy Transition Partnership* (JETP) as a Strategy for Achieving Energy Security." *Journal of International Studies on Energy Affairs* 4, no. 1 (June 30, 2023): 1–14. <https://doi.org/10.51413/jisea.vol4.iss1.2023.1-14>.

berkaitan dengan teknologi, tetapi juga melibatkan perubahan di bidang ekonomi, politik, dan lembaga.

Urgensi pengembangan energi terbarukan semakin jelas sejalan dengan komitmen dunia melalui *Paris Agreement* dan 26th *Conference of Parties (COP-26)* untuk membatasi peningkatan suhu bumi. Perhatian besar saat ini diarahkan pada energi terbarukan, karena dianggap dapat menggantikan bahan bakar fosil sekaligus memperbaiki kualitas lingkungan. Para peneliti menyatakan bahwa perubahan ini membantu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mendorong kemajuan di bidang teknologi. Energi terbarukan dianggap sebagai jawaban yang efektif untuk menurunkan emisi GRK.³

Indonesia sebagai negara yang memiliki potensi EBT yang besar seperti energi surya, panas bumi, air dan lain sebagainya, masih memiliki ketergantungan tinggi pada energi fosil terutama batu bara, baik dalam komposisi energi nasional maupun dalam penyediaan listrik. Menurut data Dewan Energi Nasional (DEN) 2023, batu bara menyumbang 40,46% dalam komposisi energi nasional, sementara EBT hanya menyumbang 13,09% saja⁴ dan sekitar 60% dari pembangkit listrik masih menggunakan batu bara. Sektor batu bara juga berkontribusi besar terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak Energi dan Sumber Daya Mineral (PNBP ESDM), yaitu sekitar 100 triliun rupiah pada tahun 2023, sekaligus menyerap 300 ribu pekerja dan menginvestasikan sekitar 2,5 triliun rupiah untuk program pemberdayaan masyarakat di sekitar lokasi tambang. Ketergantungan ini didorong

³ Rahmanitya, Nazla, dan Putra Ardiansyah. "Indonesia's *Just Energy Transition Partnership (JETP)* as a Strategy for Achieving Energy Security." *Journal of International Studies on Energy Affairs* 4, no. 1 (June 30, 2023): 1–14. <https://doi.org/10.51413/jisea.vol4.iss1.2023.1-14>.

⁴ Adi, Agus Cahyono. "Pemerintah Kejar Target Tingkatkan Bauran EBT." *Kementerian ESDM*. Diakses 19 Maret 2025. <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/pemerintah-kejar-tingkatkan-bauran-ebt>.

oleh ketersediaan batu bara dalam negeri yang melimpah dan biaya produksi yang rendah.⁵ Namun, dampak lingkungan dan tekanan global menjadikan pengurangan ketergantungan ini sangat mendesak, karena berdasarkan informasi IEA pada tahun 2022, Indonesia merupakan salah satu negara penyumbang emisi GRK terbesar global dari sektor batu bara.⁶

Dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan mendorong transisi energi, setelah bergabung kedalam *Paris Agreement* tahun 2016, Indonesia telah menetapkan target pengurangan emisis karbon dalam *Nationally Determined Contribution* (NDC) sebesar 31,89% secara mandiri dan 43,20% dengan bantuan Internasional, berdasarkan data terbaru.⁷ dan juga telah menegaskan komitmennya untuk mencapai *Net Zero Emission* (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat, seperti yang diumumkan dalam COP26 dan di atur dalam *Road Map NZE* Indonesia 2060.⁸ Upaya Indonesia ini juga diperkuat dengan beberapa penerbitan regulasi yang mendukung transisi energi. Namun, pencapaian target ini masih menghadapi berbagai tantangan, sehingga memerlukan dukungan dari komunitas internasional.

Dalam menghadapi tantangan yang berkaitan dengan transisi energi, Indonesia membangun kerja sama internasional melalui kemitraan multilateral *Just Energy Transition Partnership* (JETP) bersama negara-negara seperti Uni Eropa, Jepang, Kanada, dan Amerika Serikat. Inisiatif ini secara resmi diperkenalkan pada

⁵ Sinaga, Juanda Volo. "Batubara Indonesia: Pilar Utama Energi di Era Transisi Energi dan Hilirisasi Menuju Kemandirian Bangsa." *Minerba ESDM*, Diakses 19 Maret 2025. <https://www.minerba.esdm.go.id/berita/minerba/detil/20241003-batubara-indonesia-pilar-utama-energi-di-era-transisi-energi-dan-hilirisasi-menuju-kemandirian-bangsa>.

⁶ International Energy Agency, *Indonesia: Coal*, (Paris: International Energy Agency), Diakses Augustus 12, 2025, <https://www.iea.org/countries/indonesia/coal>.

⁷ Sekretariat JETP Indonesia. *Rencana Investasi dan Kebijakan Komprehensif (CIPP)*. Jakarta: Pemerintah Indonesia, 21 November 2023.

⁸ Anugrah, Nunu. "Indonesia Berambisi Kurangi Emisi Gas Rumah Kaca untuk Pengendalian Perubahan Iklim." *KLHK*. Diakses 19 Maret 2025. <https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/6265/indonesia-berambisi->.

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 bulan November 2022, setelah sebelumnya diumumkan pada COP26 di Afrika Selatan tahun 2021.⁹ Indonesia telah menjadi negara kedua yang menerima JETP dan yang pertama di Asia, dengan dukungan dana mencapai 20 miliar dolar AS untuk mempercepat peralihan menuju energi bersih.¹⁰ Ini juga membuat Indonesia sebagai negara mitra penerima pembiayaan JETP terbesar.¹¹

JETP merupakan program pendanaan untuk transisi energi yang diberikan oleh negara-negara maju kepada negara-negara berkembang melalui kerja sama multilateral. Program ini mencakup dukungan dana, teknologi, dan pengetahuan untuk mencapai energi berkelanjutan. Pendanaan berasal dari aktor publik, seperti anggota *International Partners Group* (Jepang, AS, Uni Eropa, dan lain-lain), serta aktor swasta yang di koordinasikan oleh *Glasgow Financial Alliance for Net Zero* (GFANZ). Dalam hal ini JETP diharapkan dapat berdampak terhadap lingkungan, pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan pekerjaan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.¹²

Kolaborasi Indonesia dan JETP berfokus pada penurunan emisi dalam sektor ketenagalistrikan melalui penghapusan secara bertahap penggunaan batu

⁹ Rahmanitya, Nazla, dan Putra Ardiansyah. "Indonesia's *Just Energy Transition Partnership* (JETP) as a Strategy for Achieving Energy Security." *Journal of International Studies on Energy Affairs* 4, no. 1 (June 30, 2023): 1–14. <https://doi.org/10.51413/jisea.vol4.iss1.2023.1-14>.

¹⁰ Chotimah, Hidayat Chusnul. "Beyond the Struggle of Indonesia for Achieving a *Just Energy Transition Partnership*: An Analysis from Adaptive Foreign Policy Theory." *Advances in Social Science, Education and Humanities Research* (2023): 86–92. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-174-6_16.

¹¹ Adi Ahdiat, "Indonesia, Negara Penerima Dana Transisi Energi JETP Paling Besar: Pusat Data Ekonomi Dan Bisnis Indonesia: Databoks," *Pusat Data Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, diakses 4 Agustus 2025, <https://databoks.katadata.co.id/energi/statistik/3edb2aeb41164ff/indonesia-negara-penerima-dana-transisi-energi-jetp-paling-besar>

¹² Rahmanitya, Nazla, dan Putra Ardiansyah. "Indonesia's *Just Energy Transition Partnership* (JETP) as a Strategy for Achieving Energy Security." *Journal of International Studies on Energy Affairs* 4, no. 1 (June 30, 2023): 1–14. <https://doi.org/10.51413/jisea.vol4.iss1.2023.1-14>.

bara. Pendanaan sebesar 20 miliar dolar AS berasal aktor publik dan swasta, dengan masing-masing aktor menyumbang 10 miliar dolar AS. Dana publik disalurkan melalui hibah, pinjaman konsensi atau non-konsensi, ekuitas, dan jaminan dari *Multilateral Development Banks* (MDBs). Sedangkan, dana swasta berupa pinjaman komersial, investasi ekuitas, dan pasar modal.¹³ Kehadiran JETP di Indonesia diharapkan dapat membantu Indonesia mengatasi tantangan terkait dengan transisi energi, mengingat Indonesia memiliki potensi sumber energi terbarukan yang besar.

Permasalahannya adalah Indonesia masih memiliki ketergantungan besar terhadap sumber energi fosil, terutama batu bara. Sebagai salah satu negara yang memiliki tingkat produksi dan konsumsi batu bara terbesar di dunia, terutama dalam sektor ketenagalistrikan.¹⁴ Batu bara juga memiliki kontribusi dalam sektor ekonomi dan sosial Indonesia. Namun, dengan adanya partisipasi Indonesia ke dalam skema JETP, terdapat komitmen untuk mengurangi penggunaan batu bara. Dalam konteks ini, penelitian ini akan mencoba menganalisis apa faktor pendorong kebijakan Indonesia bergabung kedalam skema JETP, sekaligus untuk mengisi celah penelitian yang ada.

1.2 Rumusan Masalah

Indonesia masih memiliki ketergantungan tinggi pada energi fosil, terutama batu bara yang memberikan kontribusi besar dalam komposisi energi nasional, khususnya sebagai sumber utama untuk pembangkit listrik. Selain itu, batu bara

¹³ Sekretariat JETP Indonesia. *Rencana Investasi dan Kebijakan Komprehensif (CIPP)*. Jakarta: Pemerintah Indonesia, 21 November 2023.

¹⁴ Rahmanitya, Nazla, dan Putra Ardiansyah. "Indonesia's *Just Energy Transition Partnership* (JETP) as a Strategy for Achieving Energy Security." *Journal of International Studies on Energy Affairs* 4, no. 1 (June 30, 2023): 1–14. <https://doi.org/10.51413/jisea.vol4.iss1.2023.1-14>.

juga memberikan sumbangan strategis terhadap pendapatan negara melalui PNBP di sektor ESDM dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa sumber energi fosil, terutama batu bara tidak hanya penting sebagai sumber energi, tetapi juga memiliki posisi strategis dalam sektor ekonomi dan sosial negara. Di sisi lain, Indonesia telah menegaskan komitmennya terhadap agenda transisi energi dengan berpartisipasi dalam skema JETP yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil, terutama melalui rencana pemensiunan dini PLTU batu bara. Keputusan ini menimbulkan sebuah pertanyaan penting tentang faktor-faktor yang mendorong Indonesia untuk mengambil kebijakan tersebut, mengingat peran penting batu bara dalam struktur energi, ekonomi, dan sosial negara. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis faktor pendorong kebijakan Indonesia bergabung kedalam skema JETP.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan peneliti sebelumnya, maka pertanyaan yang akan dijawab peneliti adalah apa faktor pendorong Indonesia untuk bergabung kedalam skema *Just Energy Transition Partnership* (JETP)?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menjelaskan faktor pendorong kebijakan Indonesia untuk bergabung kedalam skema *Just Energy Transition Partnership* (JETP).

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang akan dijawab di dalam penelitian ini, penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada kajian Hubungan Internasional, khususnya dalam memperkaya literatur mengenai *Environmental Foreign Policy Analysis* (EFPA) yang dikembangkan oleh Paul G. Harris, yang berfokus pada analisis faktor pendorong Indonesia bergabung dalam skema JETP. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan atau celah penelitian yang ada terkait kebijakan luar negeri yang berfokus pada lingkungan di negara-negara berkembang, serta memperdalam diskusi akademis terkait kolaborasi internasional dalam sektor lingkungan
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, pengetahuan dan pandangan yang luas kepada para pembuat kebijakan, baik di tingkat nasional maupun internasional, dalam merancang strategi transisi energi yang efektif dan adil. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat membantu pemerintah Indonesia, mitra internasional, maupun pelaku Industri, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat secara umum dalam menyusun dukungan yang sesuai untuk implementasi JETP.

1.6 Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan suatu kegiatan yang meliputi penelaahan, pengkajian, dan analisis terhadap berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian yang di angkat. Sumber-sumber tersebut dapat berupa buku, artikel ilmiah, jurnal, laporan penelitian sebelumnya, skripsi, tesis, disertasi, serta

publikasi daring yang memiliki kredibilitas. Studi pustaka ini bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan serta kesamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Dengan begitu, berikut adalah beberapa referensi pustaka yang dijadikan sebagai acuan dasar dalam penelitian ini:

Pertama, artikel jurnal yang berjudul “*Indonesia’s Just Energy Transition Partnership (JETP) as a Strategy for Achieving Energy Security*” oleh Nazla Rahmanitya, dan Putra Ardiansyah yang diterbitkan pada tahun 2023.¹⁵ Artikel ini menyajikan penjelasan mengenai cara Indonesia memanfaatkan program JETP untuk meningkatkan ketahanan energi nasional di tengah krisis energi global dan meningkatnya tekanan pada pemakaian energi fosil. Artikel ini menguraikan sejarah partisipasi Indonesia dalam skema JETP sebagai tanggapan terhadap komitmen global untuk menurunkan emisi karbon dan mencapai netralitas karbon, dengan penekanan pada sektor kelistrikan yang sangat bergantung pada batu bara. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif dengan fokus pada konsep ketahanan energi, dan menunjukkan bahwa JETP merupakan bentuk kerja sama multilateral yang tidak hanya memberikan dana, teknologi, dan dukungan kebijakan, tetapi juga mendorong transisi secara bertahap menuju sumber energi terbarukan. Artikel ini juga menekankan kendala yang dihadapi Indonesia dalam mencapai sasaran energi bersih, seperti ketergantungan anggaran pada batu bara dan kebutuhan investasi besar guna mendukung dekarbonisasi.

Merujuk kepada topik penelitian, analisis yang disajikan dalam artikel jurnal ini dapat digunakan sebagai referensi penting dalam mendukung penelitian

¹⁵ Rahmanitya, Nazla, dan Putra Ardiansyah. “Indonesia’s Just Energy Transition Partnership (JETP) as a Strategy for Achieving Energy Security.” *Journal of International Studies on Energy Affairs* 4, no. 1 (June 30, 2023): 1–14. <https://doi.org/10.51413/jisea.vol4.iss1.2023.1-14>.

karena menyajikan pemahaman kontekstual yang mendalam tentang pelaksanaan JETP di Indonesia, mencakup kepentingannya secara nasional serta struktur teknis dan kebijakan yang mendukung peralihan energi. Informasi yang terdapat dalam artikel ini dapat menambah pemahaman praktis dan mendukung dasar penelitian peneliti. Artikel ini mengulas kontribusi JETP sebagai strategi untuk meningkatkan ketahanan energi di Indonesia, dengan menyoroti elemen pasokan serta keberlanjutan energi. Namun, penjelasan di dalam artikel ini terkait faktor pendorong di balik kebijakan luar negeri Indonesia dari sudut pandangan hubungan internasional masih terbatas. Oleh sebab itu, penelitian ini akan mengisi celah tersebut dengan menerapkan pendekatan *Environmental Foreign Policy Analysis* (EFPA) dari Paul G. Harris, agar dapat memahami secara lebih mendalam faktor yang memengaruhi keputusan Indonesia untuk berpartisipasi dalam JETP.

Kedua, artikel jurnal yang berjudul “*Beyond the Struggle of Indonesia for Achieving a Just Energy Transition Partnership: An Analysis from Adaptive Foreign Policy Theory*” oleh Hidayat Chusnul Chotimah yang diterbitkan pada tahun 2024.¹⁶ Artikel ini menguraikan cara Indonesia mengatasi perubahan dari luar, terutama krisis energi global dan dorongan internasional untuk dekarbonisasi, melalui partisipasinya dalam skema JETP. Dengan menerapkan pendekatan teori kebijakan luar negeri yang adaptif menurut Rosenau, artikel ini mengungkapkan bahwa keputusan Indonesia untuk berpartisipasi dalam JETP merupakan suatu bentuk respons yang dipikirkan secara matang terhadap perubahan besar di luar negeri, sementara perubahan di dalam negeri, seperti ketergantungan pada batu bara

¹⁶ Chotimah, Hidayat Chusnul. “Beyond the Struggle of Indonesia for Achieving a *Just Energy Transition Partnership*: An Analysis from Adaptive Foreign Policy Theory.” *Advances in Social Science, Education and Humanities Research* (2023): 86–92. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-174-6_16.

dan struktur energi nasional, menunjukkan perubahan yang banyak. Artikel ini menyoroti bahwa pelaksanaan JETP hingga saat ini masih dikuasai oleh kalangan elit pemerintahan dan swasta, dan belum mencerminkan keadilan energi secara menyeluruh, terutama dalam hal keadilan prosedural dan pengakuan terhadap kelompok yang rentan. Selain menguraikan konteks kebijakan dan pendanaan energi, artikel ini menekankan tantangan struktural serta geopolitik yang dihadapi Indonesia dalam peralihan menuju energi terbarukan.

Merujuk kepada topik penelitian, analisis yang disajikan dalam artikel jurnal ini dapat digunakan sebagai referensi penting dalam mendukung penelitian karena menyajikan analisis berbasis bukti dan argumen mengenai dinamika kebijakan luar negeri Indonesia di dalam konteks JETP serta memperdalam pemahaman tentang faktor-faktor eksternal yang berpengaruh terhadap keputusan kebijakan energi. Artikel ini dapat memperkuat kerangka dasar, konteks peralihan energi, serta pentingnya keterlibatan Indonesia dalam JETP. Artikel ini menerapkan teori kebijakan luar negeri yang adaptif, yang menyoroti bagaimana negara merespon tekanan dari luar. Namun, berbeda dengan fokus penelitian ini yang berfokus menggunakan pendekatan *Environmental Foreign Policy Analysis* (EFPA) dari Paul G. Harris, artikel ini lebih menekankan pada pola repons terhadap tekanan internasional tanpa membahas secara mendalam dinamika internal seperti aktor domestik, kepentingan politik, dan ideologi yang turut membentuk kebijakan luar negeri Indonesia terkait lingkungan.

Ketiga, artikel jurnal yang berjudul “*Analyzing Indonesia’s Sustainable Energy Transition through the Just Energy Transition Partnership (JETP)*” oleh

Pratasya Aulia Muslim dan Ika Sri Hastuti yang diterbitkan pada tahun 2024.¹⁷ Artikel ini mengulas partisipasi Indonesia dalam skema JETP sebagai bagian dari komitmen internasional untuk mengurangi emisi karbon dan mempercepat pergeseran dari energi fosil ke energi bersih. Artikel ini memanfaatkan pengertian rezim iklim global dan transisi yang adil untuk menilai bagaimana kebijakan energi di Indonesia diatur dalam konteks internasional dan domestik. Artikel ini menekankan bahwa meskipun JETP memberikan kesempatan besar dalam aspek pendanaan dan dukungan internasional, pelaksanaannya di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang besar, seperti dominasi pembiayaan berupa pinjaman, kurangnya partisipasi masyarakat, dan ketidaksesuaian antara prioritas donor dan kebutuhan domestik. Artikel ini mengindikasikan bahwa JETP belum sepenuhnya merefleksikan prinsip transisi yang adil, baik dari segi prosedur maupun substansi, karena masih kurangnya sistem regulasi serta partisipasi masyarakat yang efektif.

Merujuk kepada topik penelitian, analisis yang disajikan dalam artikel jurnal ini memberikan konteks empiris mengenai tantangan yang dihadapi dalam implementasi JETP di Indonesia. Artikel jurnal ini juga dapat membantu peneliti untuk memperdalam pemahaman mengenai posisi Indonesia dalam kerangka iklim global. Adapun temuan yang ada di dalam artikel ini dapat memperkuat bagian latar belakang, konteks kebijakan energi, serta masalah yang terkait dengan pelaksanaan transisi energi dalam penelitian ini.

¹⁷ Muslim, Pratasya Aulia, dan Ika Sri Hastuti. "Analyzing Indonesia's Sustainable Energy Transition through the *Just Energy Transition Partnership* (JETP)." *Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities* 14, no. 1 (2024).

Keempat, artikel jurnal yang berjudul “*Implementasi Transisi Energi pada Pembangkit Listrik di Indonesia melalui Energy Security Tahun 2021-2023*” oleh Muhammad Zufar Fawwaz yang diterbitkan pada tahun 2024.¹⁸ Artikel ini mengkaji cara Indonesia melaksanakan transisi energi dalam bidang pembangkit listrik dengan memperhatikan aspek keamanan energi. Dalam analisisnya, artikel jurnal ini menggunakan kerangka teori dari Bert Kruyt yang memiliki fokus pada empat dimensi utama: *availability*, *accessibility*, *affordability*, dan *acceptability*.

Artikel ini melakukan analisis terhadap kebijakan transisi energi mulai dari COP26 hingga tahun 2023. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi pengaruh kebijakan seperti PERPRES No.112 Tahun 2022 dan RUPTL 2021-2030 yang berfokus pada ketahanan energi nasional, khususnya di daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal). Artikel ini menyatakan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki komitmen internasional seperti NZE 2060, pelaksanaan di tingkat nasional masih mengalami hambatan terkait pendanaan, infrastruktur, dan keadilan akses energi, sehingga proses transisi yang berlangsung belum terjadi secara merata.

Merujuk kepada topik penelitian, analisis yang disajikan dalam artikel ini memberikan pandangan yang jelas tentang tantangan struktural dan teknis dalam pelaksanaan transisi energi di sektor kelistrikan. Hal ini dapat memperluas konteks empiris dan mendukung pemahaman mengenai kondisi internal yang mungkin mempengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia, sehingga artikel jurnal ini dapat

¹⁸ Fawwaz, Muhammad Zufar. *Implementasi Transisi Energi pada Pembangkit Listrik di Indonesia melalui Energy Security Tahun 2021–2023*. Skripsi Sarjana, Universitas Islam Indonesia, 2024.

membantu peneliti dalam menganalisis keadaan atau posisi Indonesia dalam transisi energi.

Kelima, artikel jurnal yang berjudul “*Implementasi Just Energy Transition Partnership Indonesia menuju Net Zero Emissions tahun 2060*” oleh Luky Tri Hermawan, dan Adhiningasih Prabhawati yang diterbitkan pada tahun 2024.¹⁹ Artikel ini mengkaji pelaksanaan skema *Just Energy Transition Partnership* (JETP) sebagai langkah transisi energi Indonesia dalam mencapai target NZE pada tahun 2060. Artikel ini menerapkan metode kualitatif deskriptif guna menjelaskan lima fokus utama JETP, yaitu pengembangan jaringan listrik, pensiun awal PLTU batu bara, pengembangan energi terbarukan *dispatchable* dan *variable*, serta penguatan rantai pasok energi bersih. Artikel ini menekankan fungsi Sekretariat JETP, penyusunan dokumen CIPP, serta rencana pendanaan sebesar 20 miliar USD dari negara-negara mitra IPG dan organisasi keuangan GFANZ. Artikel ini menyimpulkan bahwa meskipun JETP adalah langkah penting dalam peralihan energi di Indonesia, pelaksanaan program ini masih memerlukan peningkatan regulasi, koordinasi antar lembaga, serta partisipasi masyarakat agar proses transisi dapat berlangsung secara inklusif dan berkelanjutan.

Merujuk kepada topik penelitian, analisis yang disajikan dalam artikel jurnal ini menyediakan dasar yang empiris dan kebijakan yang relevan, khususnya mengenai struktur pelaksanaan JETP, pihak-pihak yang terlibat, serta strategi transisi energi nasional. Informasi yang terdapat dalam artikel ini dapat memperkuat aspek latar belakang serta mendukung pemahaman mengenai konteks

¹⁹ Hermawan, Luky Tri, dan Adhiningasih Prabhawati. “Implementasi *Just Energy Transition Partnership* Indonesia Menuju *Net Zero Emissions* Tahun 2060.” *Jurnal Energi Baru dan Terbarukan* (2024). <https://doi.org/10.14710/jebt.2024.24161>.

kebijakan energi Indonesia, yang merupakan elemen penting dalam analisis kebijakan luar negeri terkait lingkungan, sehingga artikel jurnal ini penting bagi peneliti untuk memperoleh informasi terkait aktor dan struktur JETP hingga pemahaman mendalam dalam konteks kebijakan luar negeri terkait lingkungan di Indonesia.

1.7 Kerangka Konseptual

1.7.1 *Environmental Foreign Policy Analysis (EFPA)*

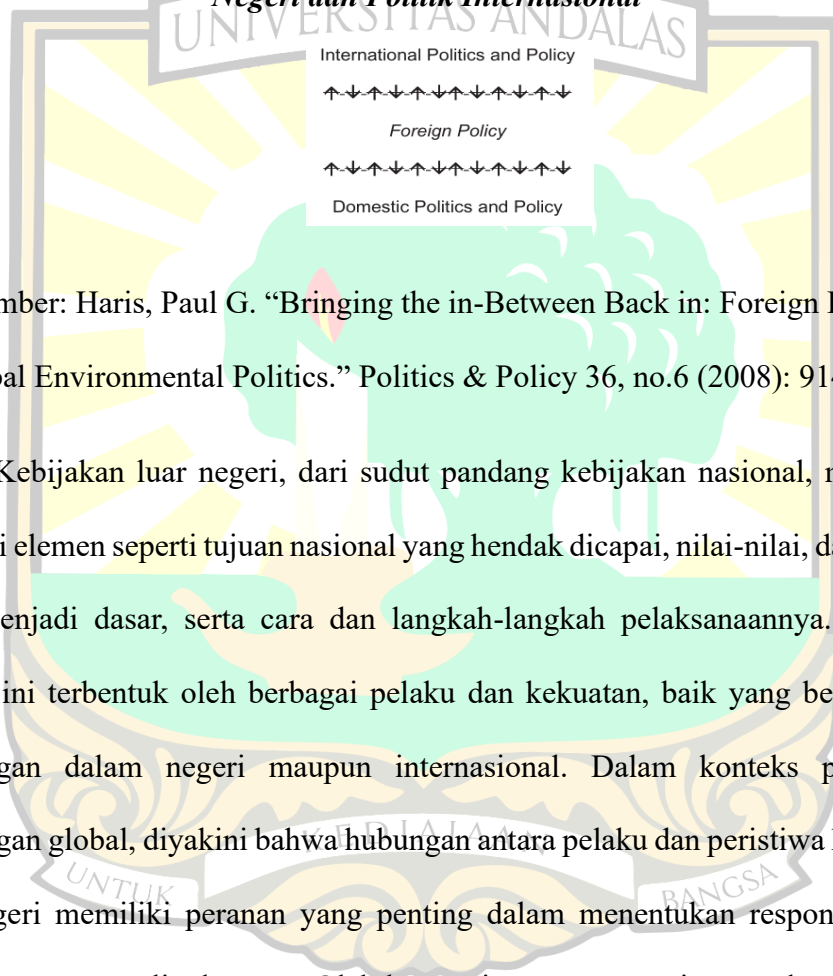
Konsep kebijakan luar negeri mengacu pada serangkaian langkah yang diambil oleh suatu negara dalam membangun relasi dengan pihak internasional lainnya, untuk memenuhi dan menjaga kepentingan nasionalnya. Hermann mendefinisikan kebijakan luar negeri sebagai tindakan konkret yang berasal dari keputusan politik, sementara Modelski memandangnya sebagai rangkaian aktivitas yang dilakukan oleh negara untuk mempengaruhi perilaku negara lain serta beradaptasi dengan lingkungan internasional.²⁰

Frankel kemudian juga mengembangkan pemahaman mengenai kebijakan luar negeri dengan menyatakan bahwa kebijakan luar negeri mencakup seluruh keputusan dan tindakan suatu negeri yang berkaitan dengan aktor asing. Sementara itu, Padelford dan Lincoln melihat kebijakan luar negeri sebagai cara untuk mengubah tujuan nasional menjadi tindakan konkret di dunia luar. Bojang menyatakan bahwa kebijakan luar negeri memiliki tiga komponen utama yaitu *end* (tujuan atau hasil yang ingin dicapai dalam hubungan internasional), *ways* (strategi atau pendekatan yang diterapkan seperti diplomasi, paksaan, atau kolaborasi), dan

²⁰ Bojang, AS. *The Study of Foreign Policy in International Relations*. *Journal of Political Sciences & Public Affairs* 6, no. 4 (2018): 337. <https://doi.org/10.4172/2332-0761.1000337>.

means (sumber daya yang dimiliki negara seperti kekuatan militer, ekonomi, dan teknologi), sehingga kebijakan luar negeri tidak hanya mencerminkan tujuan politik suatu negara, tetapi juga merupakan merupakan hasil dari strategi yang dibangun berdasarkan kemampuan dan situasi global yang ada.²¹

Gambar 1.1. *Politik Luar Negeri: Antara dan Bagian dari Politik Dalam Negeri dan Politik Internasional*



Sumber: Haris, Paul G. “Bringing the in-Between Back in: Foreign Policy in Global Environmental Politics.” *Politics & Policy* 36, no.6 (2008): 914-943.

Kebijakan luar negeri, dari sudut pandang kebijakan nasional, mencakup berbagai elemen seperti tujuan nasional yang hendak dicapai, nilai-nilai, dan prinsip yang menjadi dasar, serta cara dan langkah-langkah pelaksanaannya. Elemen-elemen ini terbentuk oleh berbagai pelaku dan kekuatan, baik yang berasal dari lingkungan dalam negeri maupun internasional. Dalam konteks perubahan lingkungan global, diyakini bahwa hubungan antara pelaku dan peristiwa kebijakan luar negeri memiliki peranan yang penting dalam menentukan respon manusia terhadap tantangan lingkungan. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami dan mengakui fungsi strategis dari kebijakan luar negeri dalam menangani masalah

²¹ Bojang, AS. *The Study of Foreign Policy in International Relations. Journal of Political Sciences & Public Affairs* 6, no. 4 (2018): 337. <https://doi.org/10.4172/2332-0761.1000337>.

lingkungan dengan memperhatikan hubungan antara dinamika di dalam negeri dan internasional.²²

Konsep kebijakan luar negeri yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah pendekatan kebijakan luar negeri lingkungan, yang diuraikan oleh Paul G. Harris dalam bukunya yang berjudul *Environmental Change and Foreign Policy: Theory and Practice*.²³ Buku ini memberikan penjelasan mengenai kebijakan luar negeri terkait lingkungan hidup. Buku ini juga memberikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi suatu negara dalam proses pembentukan kebijakan luar negeri lingkungan hidup.

Tabel 1.1 Tipologi Kebijakan Luar Negeri Lingkungan

	Systemic (International System)	Societal (Domestic Politics)	State Centric (Government)
Power	I. <i>Structural Realism; Hegemonic Model</i>	IV. <i>Elite Theory; Class Analysis</i>	VII. <i>Executive- Legislature Relations</i>
Interests	II. <i>National Interest Model</i>	V. <i>Interest Group Politics; Pluralist Models</i>	VIII. <i>Bureaucratic Politics Model</i>
Ideas	III. <i>Sociological Approach to International Regimes</i>	VI. <i>Media Studies, Social Movements; Public Opinion</i>	IX. <i>Foreign Policy Executive; Psychology</i>

Sumber: Haris, Paul G. "Bringing the in-Between Back in: Foreign Policy in Global Environmental Politics." *Politics & Policy* 36, no.6 (2008): 914-943.

²² Harris, Paul G. "Bringing the In-Between Back In: Foreign Policy in Global Environmental Politics." *Politics & Policy* 36, no. 6 (2008): 914–943.

²³ Paul G. Harris, *Environmental Change and Foreign Policy: Theory and Practice* (Taylor & Francis, 2009).

Kebijakan luar negeri lingkungan (*Environmental Foreign Policy*) adalah kebijakan yang dibuat oleh suatu negara untuk mengatasi isu-isu lingkungan melalui kerja sama internasional, namun tetap dipengaruhi oleh kepentingan dan keadaan domestik. Menurut Paul G. Harris dan Jhon Barkdull, terdapat tiga aspek dalam melakukan penilaian atau analisis kebijakan luar negeri. Pertama, aspek yang berbasis kekuatan (*power-based*), dengan penekanan pada analisis pengaruh kekuasaan hegemoni terhadap suatu negara dan aktor paling berpengaruh dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri, dengan contoh seperti Perdana Menteri, Presiden, kelompok kepentingan, dan politisi. Dalam beberapa situasi, tampak bahwa Presiden dan Perdana Menteri memiliki kekuasaan yang lebih besar.

Kedua, aspek berbasis kepentingan (*interest-based*), yang menekankan pada kepentingan berbagai kelompok. Dalam pendekatan ini, pembuatan kebijakan luar negeri adalah hasil dari negosiasi dan tawar-menawar yang melibatkan berbagai kepentingan. Ketiga, pendekatan kognitif (*cognitive-approach*), dengan menekankan pengaruh gagasan dalam area politik internasional. Ide-ide yang baru memberikan panduan kepada negara-negara mengenai metode baru untuk meraih kepentingan nasional mereka, sehingga akhirnya gagasan atau ide tersebut membentuk identitas dan tatanan negara itu sendiri.²⁴

Paul G. Harris menggabungkan ketiga aspek, yaitu *systemic*, *societal*, dan *state-centric* dalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan negara, khususnya terkait kebijakan luar negeri lingkungan. Dalam teori *systemic*, analisis terfokus pada pembahasan mengenai kontribusi sistem

²⁴ Harris, Paul G. "Bringing the In-Between Back In: Foreign Policy in Global Environmental Politics." *Politics & Policy* 36, no. 6 (2008): 914–943.

internasional dalam membentuk identitas, mengidentifikasi kepentingan negara, serta bagaimana hal itu memengaruhi perilaku negara tersebut. Dalam teori *societal*, analisis terfokus pada peran aktor domestik dan bagaimana mereka mempengaruhi pembentukan kebijakan luar negeri terkait lingkungan, dan dalam teori *state-centric*, analisis berfokus pada peran negara dan lembaga domestik dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri suatu negara.²⁵

Berdasarkan penjelasan mengenai beberapa aspek sebelumnya, Paul G. Harris mencatatkan teori yang disarankan untuk digunakan dalam menganalisis faktor yang mempengaruhi penyusunan kebijakan luar negeri terkait lingkungan. Paul G. Harris, dalam kerangka EFPA memberikan keleluasaan kepada peneliti untuk memilih berbagai kombinasi pendekatan yang paling cocok dengan fokus dan tingkat analisis dari penelitian yang dilakukan. Kerangka yang disediakan oleh Paul G. Harris tidak dimaksudkan sebagai teori tunggal, melainkan sebagai panduan analitis yang fleksibel untuk memahami perilaku negara dalam isu lingkungan.²⁶ Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan pendekatan *Interest-Based* yang dilihat dari aspek *state-centric* oleh Paul G. Harris, untuk menganalisis faktor pendorong kebijakan Indonesia bergabung dalam skema JETP.

Dalam teori pendekatan analisis kebijakan luar negeri yang berfokus pada aspek negara oleh Paul G. Harris ini, lebih lanjut menjelaskan bahwa aktor institusi pemerintah atau negara merupakan kunci utama dalam menentukan kebijakan luar negeri negara yang berkaitan dengan lingkungan. Keputusan dalam kebijakan

²⁵ Barkdull, John, and Paul G. Harris. "Environmental Change and Foreign Policy: A Survey of Theory." *Global Environmental Politics* 2, no. 2 (May 2002): 63–91. <https://doi.org/10.1162/15263800260047804>.

²⁶ Harris, Paul G. "Bringing the In-Between Back In: Foreign Policy in Global Environmental Politics." *Politics & Policy* 36, no. 6 (2008): 914–943.

didasarkan pada penafsiran dari kalangan elit politik dan aparat birokrasi negara terkait dengan kepentingan nasional, yang biasanya mencakup tujuan-tujuan strategis, misalnya seperti kepentingan ekonomi, keamanan energi, legitimasi politik, citra internasional dan lain sebagainya. Dalam konteks ini, negara dianggap sebagai entitas independen yang menetapkan kebijakan luar negeri lingkungan dengan pertimbangan rasional tentang keuntungan dan kemungkinan kerugian terhadap tujuan nasional.²⁷

Pada pendekatan *interest based on state-centric* yang diterangkan oleh Paul G. Harris menempatkan negara sebagai aktor utama yang membentuk atau menentukan kebijakan luar negeri sesuai dengan kepentingan nasionalnya. Negara dipahami memiliki kepentingan yang tidak dapat di reduksi hanya pada kepentingan kelompok masyarakat, tetapi juga berkaitan dengan hal-hal strategis. Dengan kata lain, negara tidak sepenuhnya dikendalikan atau dikuasai oleh masyarakat atau kelompok kepentingan tertentu, karena negara memiliki logika keberlangsungan hidupnya sendiri yang memungkinkannya bertindak secara mandiri dari masyarakat, contohnya seperti:

1. Ekonomi dan pendanaan: negara memerlukan sumber pembiayaan yang besar untuk mendukung transisi energi dan pembangunan jangka panjang, sehingga perlu mencari akses dana di luar kapasitas domestik
2. Keamanan energi dan stabilitas politik: negara berupaya memastikan ketersediaan energi tetap terjaga dengan baik guna mencegah terjadinya krisis yang dapat mengganggu kestabilan politik dan sosial

²⁷ Barkdull, John, and Paul G. Harris. "Environmental Change and Foreign Policy: A Survey of Theory." *Global Environmental Politics* 2, no. 2 (May 2002): 63–91. <https://doi.org/10.1162/15263800260047804>.

3. Posisi Internasional dan legitimasi politik: keterlibatan yang aktif dalam masalah energi global mampu menciptakan citra yang baik, meningkatkan legitimasi, dan memperkuat posisi negosiasi negara di tingkat internasional
4. Pengelolaan institusi dan reformasi kebijakan: negara memanfaatkan masa transisi energi untuk memperkuat sistem birokrasi, memperbarui peraturan, dan meningkatkan efisiensi pengelolaan institusi.
5. Sosial dan kesejahteraan: negara memberikan perlindungan kepada masyarakat yang terkena dampak transisi energi melalui sistem jaminan sosial dan menciptakan kesempatan kerja baru, guna memastikan proses transisi energi tidak menimbulkan ketidakadilan atau hambatan.

Dalam konteks ini, pendekatan tersebut dapat dilakukan dengan cara mengidentifikasi terlebih dahulu kepentingan negara yang relevan, kemudian melacak bagaimana kepentingan tersebut di wujudkan dalam kebijakan luar negeri yang spesifik.²⁸

Di samping itu, pendekatan ini juga menyatakan bahwa kebijakan negara tidak selalu berasal dari satu kepentingan yang utuh, melainkan merupakan hasil persaingan dari dinamika internal dalam birokrasi. Hal ini dapat dipahami melalui model politik birokrasi (*bureaucratic politics model*) yang memandang negara bukan sebagai aktor tunggal, melainkan arena di mana berbagai lembaga dan pejabat birokrasi memiliki kepentingan, agenda, serta preferensi masing-masing. Proses pembuatan kebijakan terjadi melalui negosiasi, kompromi, dan konflik antar

²⁸ Barkdull, John, and Paul G. Harris. "Environmental Change and Foreign Policy: A Survey of Theory." *Global Environmental Politics* 2, no. 2 (May 2002): 63–91. <https://doi.org/10.1162/15263800260047804>.

lembaga, sehingga keputusan akhir sering kali mencerminkan hasil kesepakatan politik birokratis daripada pilihan yang paling rasional. Analisis kebijakan negara melalui model ini menyoroti pentingnya memahami hubungan antara birokrasi, siapa yang memiliki peran dominan dalam proses tersebut, dan bagaimana kepentingan institusional mempengaruhi arah kebijakan negara.²⁹

Dengan menggunakan pendekatan *interest-based on state-centric* dalam penelitian ini, dapat membantu memfasilitasi peneliti dalam memahami elemen-elemen penting yang mendorong pembentukan kebijakan luar negeri suatu negara, terkhususnya dalam hal ini adalah menjelaskan apa faktor pendorong kebijakan atau keputusan Indonesia bergabung ke dalam skema JETP.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian, peneliti menerapkan metode kualitatif guna memperoleh data yang bersumber dari berbagai referensi ilmiah. Pengumpulan data melalui sumber-sumber ilmiah ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam kepada peneliti tentang topik penelitian dan masalah yang terkait dengan topik tersebut. Metode penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mengumpulkan data sehingga peneliti dapat menjelaskan penemuan-penemuan yang telah diidentifikasi secara mendetail, disertai dengan penjelasan mengenai setiap temuan tersebut. Metode penelitian ini akan lebih fokus pada pengamatan serta melakukan studi mendalam mengenai arti dari fenomena tersebut.

²⁹ Barkdull, John, and Paul G. Harris. "Environmental Change and Foreign Policy: A Survey of Theory." *Global Environmental Politics* 2, no. 2 (May 2002): 63–91. <https://doi.org/10.1162/15263800260047804>.

Jenis penelitian kualitatif dipilih oleh peneliti agar peneliti dapat memiliki keleluasaan untuk melakukan deskripsi dan analisis mengenai kebijakan luar negeri Indonesia dalam *Just Energy Transition Partnership* (JETP). Analisis yang dilakukan terhadap kebijakan luar negeri Indonesia dalam JETP ini melibatkan analisis faktor pendorong kebijakan Indonesia bergabung dalam skema JETP menggunakan pendekatan *Environmental Foreign Policy Analysis* (EFPA) oleh Paul G. Harris.

1.8.2 Batasan Masalah

Penelitian ini akan fokus pada periode waktu antara tahun 2016 hingga 2024. Penentuan periode tersebut didasarkan pada beberapa faktor penting. Pertama, pada tahun 2016, Indonesia secara resmi menjadi anggota *Paris Agreement*, yang menandakan Indonesia semakin aktif untuk berpartisipasi dalam agenda perubahan iklim global. Selama periode ini, terdapat berbagai peristiwa penting seperti, COP26, KTT G20, dan pembentukan skema kerja sama *Just Energy Transition Partnership* (JETP), yang semuanya sangat berkaitan dengan arah kebijakan luar negeri Indonesia dalam aspek lingkungan. Kedua, periode 2016 hingga 2024 ini bertepatan dengan masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, di mana keputusan-keputusan penting mengenai komitmen Indonesia terhadap perubahan iklim dan partisipasinya dalam JETP di ambil, sehingga rentang waktu 2016 hingga 2024 dipandang sebagai waktu yang tepat untuk menganalisis secara komprehensif berbagai elemen yang mempengaruhi proses penyusunan dan pengambilan keputusan kebijakan luar negeri Indonesia terkait isu lingkungan global.

1.8.3 Unit dan Tingkat Analisis

Unit analisis adalah unit yang objek perilakunya akan diteliti, dijelaskan, diuraikan, atau diprediksi. Unit analisis juga terhubung dengan variabel dependen. Dalam studi ini, peneliti menentukan unit analisis tersebut berkaitan dengan keputusan kebijakan luar negeri Indonesia untuk bergabung kedalam skema kerja sama transisi energi *Just Energy Transition Partnership* (JETP). Selanjutnya, terdapat unit eksplanasi dimana unit tersebut terhubung dengan variabel independen yang mempengaruhi perilaku unit analisis. Dalam penelitian ini, unit eksplanasinya adalah *Just Energy Transition Partnership* (JETP) sebagai kebijakan luar negeri Indonesia dalam transisi energi.

Selanjutnya, tingkat analisis yang merupakan suatu teori yang dapat mendukung penelitian dalam upaya menemukan jawaban atas pertanyaan penelitian. Carmen Gebhard menjelaskan bahwa terdapat 4 tingkat analisis dalam studi hubungan internasional, yaitu tingkat sistem, tingkat negara, tingkat kelompok, dan tingkat individu.³⁰ Adapun tingkat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat negara, yaitu Indonesia. Peneliti memilih analisis tingkat negara karena di dalam penelitian ini akan berfokus pada menguraikan atau menganalisis faktor pendorong kebijakan Indonesia untuk bergabung kedalam skema *Just Energy Transition Partnership* (JETP) dengan menggunakan pendekatan *interest based on state-centric* oleh Paul G. Harris.

³⁰ Gebhard, Carmen. "Levels of Analysis in International Relations." *E-International Relations*, March 27, 2022. <https://www.e-ir.info/2022/03/27/levels-of-analysis-in-international-relations/>.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti akan memanfaatkan data sekunder. Data sekunder adalah informasi yang diperoleh peneliti melalui pengumpulan data dengan melakukan studi kepustakaan. Dalam melaksanakan studi kepustakaan untuk mengumpulkan informasi, data yang dikumpulkan hanya dibatasi pada informasi yang berasal dari literatur dan dokumen tertulis yang sudah ada sebelumnya, tanpa menggunakan data langsung (data lapangan). Literatur dan dokumen tertulis yang dijadikan sumber sekunder dapat diperoleh dari artikel jurnal, tesis, buku, koran, majalah, dan situs resmi seperti yang telah disajikan pada bagian studi pustaka.

Dalam mengumpulkan data sekunder, peneliti akan meninjau penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Peneliti akan mengkaji dan mempelajari jurnal, artikel, dokumen, dan laporan yang relevan dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Selain itu, peneliti akan mengumpulkan informasi dari sumber yang disediakan oleh website resmi pemerintah Indonesia contohnya seperti website Kementerian ESDM yang dapat di akses melalui <https://www.esdm.go.id/>. Setelah peneliti memperoleh data sekunder yang diperlukan untuk penelitian, peneliti akan menganalisis dan menggambarkan data sekunder yang ada, yang kemudian bermanfaat untuk menarik kesimpulan.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah metode yang digunakan untuk mengolah dan menjelaskan data yang telah diperoleh, sehingga dapat dimengerti dengan cara yang teratur. Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data dari

Miles dan Huberman. Dalam analisis data menggunakan model ini mencakup 3 elemen utama:³¹

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Tahap awal ini mengacu kepada proses penyederhanaan data, yang mencakup penyaringan, pemilihan, dan peringkasan data yang telah diperoleh agar hanya berfokus pada informasi yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, data yang didapat dari dokumen kebijakan, artikel ilmiah, laporan resmi, dan berbagai sumber skunder lainnya akan dipilih untuk menemukan elemen-elemen yang berhubungan dengan faktor-faktor pendorong kebijakan luar negeri Indonesia dalam skema JETP.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data diringkas, tahap selanjutnya adalah mengorganisir dan menampilkan data dalam cara yang teratur agar lebih mudah untuk dianalisis dan dipahami. Penyampaian informasi dapat dilakukan melalui narasi deskriptif yang teratur, tabel, atau diagram konsep yang menunjukkan keterkaitan antara faktor-faktor utama yang ditemukan. Dalam penelitian ini, data akan disajikan melalui pendekatan *Environmental Foreign Policy Analysis* (EFPA) yang dikemukakan oleh Paul G. Harris untuk menjelaskan hubungan antara berbagai faktor sistemik, sosial, dan kelembagaan dalam proses pembentukan kebijakan Indonesia untuk bergabung dalam JETP.

3. Penarikan dan Verifikasi kesimpulan (*Conclusion Drawing & Verification*)

³¹ Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Edisi ke-3. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2014.

Setelah tahap penyajian data, tahap akhir adalah mengembangkan kesimpulan dari data yang telah diringkas dan ditampilkan. Peneliti akan mengeksplorasi pola, tema, dan hubungan sebab-akibat dari beragam temuan yang ada, serta menghubungkannya dengan kerangka teori yang diterapkan. Dalam tahap ini, peneliti juga akan melakukan pengujian untuk memastikan bahwa kesimpulan yang diambil benar-benar didasarkan pada data dan tidak berdasarkan dugaan. Keabsahan temuan akan diperkuat dengan melakukan perbandingan terhadap berbagai sumber data dan mengacu pada literatur yang berkaitan.

Dengan melaksanakan tiga langkah ini, analisis data dalam penelitian ini diharapkan dapat menyajikan pemahaman yang jelas, teratur, dan komprehensif mengenai elemen-elemen yang mempengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia dalam berpartisipasi dalam JETP, terutama dalam konteks transisi energi.

1.9 Sitematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab 1, menyajikan pengantar umum tentang penelitian yang dilakukan. Dalam bab ini terdapat penjelasan mengenai latar belakang masalah yang mendasari pemilihan topik, rumusan masalah yang ingin dipecahkan, pertanyaan penelitian yang akan dijawab, tujuan yang ingin diraih, serta manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, baik secara praktis maupun akademis. Bab ini juga mencakup tinjauan pustaka, kerangka konseptual yang menguraikan landasan teori yang diterapkan, metode penelitian yang menjelaskan pendekatan serta teknik yang digunakan dalam pengumpulan dan analisis data,

dan diakhiri dengan penjelasan tentang sistematika penulisan secara keseluruhan.

BAB II KEBIJAKAN TRANSISI ENERGI INDONESIA

Bab 2, membahas profil dan kondisi energi Indonesia, sekaligus memaparkan kebijakan-kebijakan strategis yang telah diambil oleh pemerintah Indonesia untuk mendukung transisi energi.

BAB III *JUST ENERGY TRANSITION PARTNERSHIP* (JETP) SEBAGAI SKEMA KERJA SAMA TRANSISI ENERGI INDONESIA

Bab 3, menguraikan secara rinci mengenai *Just Energy Transition Partnership* (JETP) sebagai sebuah program kolaborasi global yang berfokus pada transisi energi. Bab ini membahas latar belakang pembentukan JETP, prinsip utama, susunan pendanaan, pihak-pihak yang terlibat, serta cara pelaksanaan skema ini di Indonesia.

BAB IV FAKTOR PENDORONG KEBIJAKAN INDONESIA BERGABUNG KE DALAM SKEMA *JUST ENERGY TRANSITION PARTNERSHIP* (JETP)

Bab 4, merupakan bagian utama dari penelitian ini. Bab ini membahas elemen-elemen yang mendorong kebijakan luar negeri Indonesia untuk ikut serta dalam skema JETP. Analisis ini dilakukan dengan menerapkan pendekatan *Environmental Foreign Policy Analysis* (EFPA) yang dikembangkan oleh Paul G. Harris. Peneliti akan menjelaskan faktor-faktor dari perspektif sistem Internasional, aktor-aktor domestik, serta tatanan pemerintahan dan lembaga negara yang berpengaruh terhadap proses pengambilan keputusan tersebut.

BAB V PENUTUP

Bab 5, menyajikan ringkasan dari hasil analisis yang telah dilakukan. Selain itu, bagian ini juga menyampaikan saran atau rekomendasi yang didasarkan pada hasil-hasil penelitian, baik untuk pengambilan kebijakan, aktor internasional, maupun peneliti selanjutnya yang berminat untuk meneliti topik yang sama.

